BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Analisis Kebijakan

2.1.1 Pengertian Analisis

Bernadus Luankali dalam bukunya *Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan* mengungkapkan bahwa analisis didefinisikan sebagai "penyerapan, pengkajian serta penggunaan informasi guna membuat kesimpulan". (Luankali, 2007:114). Hal ini berarti bahwa dalam menganalisis peneliti melakukan kajian terhadap suatu objek riset dengan terlebih dahulu memecahnya ke dalam beberapa bagian, kemudian dilakukan pengujian atas bagian-bagian itu.

Menurut Dale Yoder seperti yang dikutif oleh A. A. Anwar Prabu Mangkunegara dalam bukunya *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan* analisis didefinisikan sebagai "Prosedur melalui fakta-fakta yang berhubungan dengan setiap pengamatan yang diperoleh dan dicatat secara sistematis" (dalam Mangkunegara, 2001:13). Berdasarkan pendapat di atas, kegiatan analisis merupakan proses kerja dari rentetan tahapan pekerjaan sebelum riset didokumentasikan melalui tahapan penulisan laporan. Analisis dapat dilihat dari berbagai perspektif. Halim dalam bukunya *Analisis Investasi* menjelaskan analisis dapat dilihat dari :

1. Secara Mekanis, dalam tahapan analisis akan terjadi:
   a) Perubahan angka dan catatan hasil pengumpulan data jadi informasi yang lebih mudah dipahami.

b) Penggunaan alat analisis yang bermanfaat untuk membuktikan hipotesis ataupun pendeskripsian variabel riset secara benar, bukan kebetulan saja.
c) Penginterprestasian berbagai informasi dalam kerangka yang lebih luas, atau inferensi ke populasi, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul.

2. Secara Substantif, dalam tahapan analisis dilakukan proses:
   a) Membandingkan dan mengetes teori atau konsep dengan informasi yang ditemukan.
   b) Mencari dan menentukan konsep baru dari data yang dikumpulkan.
   c) Mencari penjelasan apakah konsep baru itu berlaku umum, atau baru terjadi bila ada kondisi tertentu

(Halim, 2002: 35).

Perspektif analisis baik dilihat secara mekanis atau substantif akan lebih memudahkan dalam menganalisis. Perspektif analisis juga dapat menentukan dari sisi mana kita akan menganalisis. Secara substantif dalam pembuatan kebijakan SIM Lingkungan, BPLH dan Bapapsi menggunakan perspektif tersebut.

2.1.2 Macam-Macam Analisis

Analisis merupakan aktivitas untuk menciptakan pengetahuan. Analisis diperlukan untuk mengetahui kekurangan apa saja yang dihadapi dalam suatu aktivitas. Menurut Halim dalam bukunya *Analisis Investasi,* menguraikan bahwa analisis dapat dilihat sesuai dengan kegunaannya yaitu:

1. Analisis Teknikal
   Analisis Teknikal adalah analisis yang dimulai dengan cara memperhatikan instansi itu sendiri dari waktu ke waktu.
2. Analisis Kekuatan Relatif *(Relative Strength Analysis)*
   Analisis Kekuatan Relatif adalah analisis yang berupaya mengidentifikasikan masalah yang memiliki kekuatan relative terhadap masalah lain.
3. Analisis Fundamental
   Analisis Fundamental adalah suatu sekuritas memiliki nilai intrinsik tertentu (nilai tingkah lakunya). Nilai intrinsik suatu sekuritas ditentukan oleh faktor-faktor fundamental yang mempengaruhinya. Faktor tersebut dapat dari instansi. Analisis ini akan membandingkan

nilai intrinsik suatu sekuritas dengan tingkah laku pegawai guna menentukan apakah sudah dapat diterapkan atau belum. Analisis ini akan memahami dan akhirnya mengevaluasi kinerja pegawai yang diterapkan.

4. Analisis Instansi Individual
   Analisis Instansi Individual adalah analisis yang dilakukan dengan mengamati kinerja fungsi-fungsi instansi dan kepemimpinan para pegawai. Analisis ini akan mengetahui perkembangan dan kondisi kinerja pegawai.

(Halim, 2002: 40).

Berdasarkan kegunaan analisis di atas, maka kita dapat mengetahui apakah tujuan analisis tersebut. Kegunaan analisis di atas merupakan tolak ukur dalam pembuatan kebijakan SIM Lingkungan di BPLH dan Bapapsi Kabupaten Bandung. Adapun analisis teknikal dan analisis instansi individual menjadi gambaran BPLH dan Bapapsi dalam pembuatan kebijakan SIM Lingkungan itu sendiri.

2.1.3 Pengertian Kebijakan

Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Bernadus Luankali berpendapat bahwa kebijakan adalah “Ilmu tentang hubungan pemerintah dengan warga negara atau apa yang sesungguhnya dibuat oleh pemerintah secara riil untuk warga negara.” (Luankali, 2007:145). Hal ini berarti bahwa pemerintah dalam membuat suatu kebijakan tidak hanya untuk kepentingan pribadinya saja, namun berdasarkan kepentingan masyarakat.

Menurut Woll kebijakan merupakan “aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat”. (dalam

Tangkilisan, 2003:2). Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya.

Kebijakan mencakup seluruh bagian aturan-aturan yang ada termasuk konteks politik, karena pada dasarnya proses pembuatan kebijakan sesungguhnya merupakan suatu proses politik. Menurut M. Irfan Islamy berpendapat bahwa:

> "kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh lagi (lebih menekankan kepada kearifan seseorang), sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya sehingga *policy* lebih tepat diartikan sebagai kebijakan, sedangkan kebijaksanaan merupakan pengertian dari kata *wisdo"* (Islamy, 1995:5).

Kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Menurut Brian W. Hogwood and Lewis A. Gunn secara umum kebijakan dikelompokan menjadi tiga, yaitu:

1. Proses pembuatan kebijakan merupakan kegiatan perumusan hingga dibuatnya suatu kebijakan.
2. Proses implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan.
3. Proses evaluasi kebijakan merupakan proses mengkaji kembali implementasi yang sudah dilaksanakan atau dengan kata lain mencari jawaban apa yang terjadi akibat implementasi kebijakan tertentu dan membahas antara cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai

(dalam Tangkilisan, 2003:5).

Berdasarkan pengelompokan tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan memiliki tiga proses yang harus dikaji. Pengkajian dilakukan agar memudahkan

aparatur dalam membuat suatu kebijakan dan meneliti kekurangan apa yang terjadi. Adapun menurut Woll terdapat tingkatan pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan yaitu:

1. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan dari tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat.
2. Adanya *output* kebijakan dimana kebijakan yang diterapkan untuk melakukan pengaturan/penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan rakyat.
3. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi masyarakat.

(dalam Tangkilisan, 2003:2)

Berdasarkan tingkat pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan di atas, pada dasarnya kebijakan bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat. Pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan harus dapat melakukan suatu tindakan yang merupakan suatu bentuk dari pengalokasian nilai-nilai masyarakat itu sendiri.

2.1.4 Analisis Kebijakan

Dunn mengemukakan pengertian analisis kebijakan dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*. Menurutnya analisis kebijakan adalah ”suatu aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik”. (Dunn, 2003:43). Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan oleh pendapat para ahli di atas, maka analisis kebijakan merupakan aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dunn mengatakan keberhasilan analisis pembuatan kebijakan dapat dikembangkan melalui tiga proses, yaitu:

1) Proses pengkajian kebijakan, menyajikan metodologi untuk analisis kebijakan. Metodologi di sini adalah sistem standar, aturan, dan prosedur untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.

2) Proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.
3) Proses komunikasi kebijakan, merupakan upaya untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya. Dalam hal ini sebagai penciptaan dan penilaian kritis, pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.

(Dunn, 2003:1).

Analisis kebijakan merupakan suatu proses kognitif, sementara pembuatan kebijakan bersifat politis. Keberadaan analisis kebijakan disebabkan banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan. Kebijakan dianggap tidak memecahkan masalah, bahkan menciptakan masalah baru. Analisis kebijakan, diperlukan untuk mengetahui kebijakan apa yang cocok dalam proses pembuatan kebijakan. Kebijakan tersebut dibuat sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Analisis dapat dikembangkan di awal pembuatan suatu kebijakan ataupun di akhir penerapan kebijakan.

Analisis kebijakan menurut Budi Winarno "berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab akibat dan konsekuensi - konsekuensi kebijakan". (Winarno, 2005:27). Analisis kebijakan adalah bentuk penelitian terapan yang dijadikan untuk mencapai tingkat pengetahuan yang lebih mendalam tentang isue-isue teknik sosial yang membawakan solusi-solusi yang lebih baik.

Definisi analisis kebijakan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan merupakan suatu pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian atau penyelidikan sebuah sebab akibat dari suatu kebijakan yang mampu memberikan jalan keluar dari berbagai macam alternatif program serta kinerja kebijakan. Analisis kebijakan dapat menganalisis pembentukan, substansi dan dampak dari

kebijakan-kebijakan tertentu. Analisis kebijakan dilakukan tanpa mempunyai kecenderungan untuk menyetujui atau menolak kebijakan-kebijakan. Pada dasarnya terdapat tiga hal pokok dalam menganalisis kebijakan yaitu:

1. Fokus utama adalah mengenai penjelasan / anjuran kebijakan yang pantas
2. Sebab-sebab dan konsekunsi dari kebijakan diselidiki dengan menggunakan metodologi ilmiah
3. Analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan kebijakan-kebijakan dan pembentukannya. Sehingga dapat diterapkan kepada lembaga dan bidang kebijakan yang berbeda.

(dalam Tangkilisan, 2003:3).

Berdasarkan pemaparan di atas analisis kebijakan dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi masalah-masalah politik sosial sekarang ini.

2.1.5 Ciri-ciri Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan memiliki beberapa ciri, seperti yang dikemukakan oleh Joko Widodo dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik,* bahwa ciri-ciri dari analisis kebijakan sebagai berikut :

1. Analisis kebijakan sebagai aktivitas kognitif *(cognitive activity)*
2. Analisis kebijakan sebagai bagian dari proses kebijakan secara kolektif sehingga merupakan hasil aktivitas kolektif.
3. Analisis kebijakan sebagai disiplin intelektual terapan.
4. Analisis kebijakan berkaitan dengan masalah-masalah publik

(Widodo, 2007: 20-22)

Adapun penjelasan dari ciri-ciri analisis kebijakan di atas sebagai berikut *Pertama,* Analisis kebijakan sebagai aktivitas kognitif *(cognitive activity),* yaitu aktivitas yang berkaitan dengan *learning and thinkity.* Aktivitas tersebut hanya sebagai salah satu aspek dari proses kebijakan (*policy process*), artinya masalah kebijakan didefinisikan, ditetapkan, dipecahkan, dan ditinjau kembali. Proses

tersebut akan melibatkan berbagai pihak, baik pihak yang setuju maupun yang tidak, baik mereka sebagai pemilih maupun yang dipilih.

Kedua, Analisis kebijakan sebagai bagian dari proses kebijakan secara kolektif sehingga merupakan hasil aktivitas kolektif. Analisis pada tataran awal hanya bisa dilakukan secara individual. Analisis lebih tepat dipahami sebagai kontribusi yang terorganisasi sekaligus sebagai pengetahuan kolektif terhadap masalah kebijakan tertentu.

Ketiga, analisis kebijakan sebagai disiplin intelektual terapan. Masalah kebijakan harus dikaji melalui aktivitas dari sejumlah analisis. Aplikasi sederhana berkaitan dengan kebijaksanaan konvensional sekalipun dalam pengertian ini bukan sebagai disiplin.

Keempat, analisis kebijakan berkaitan dengan masalah-masalah publik, tidak semua masalah masuk ranah publik bahkan ketika masalah tersebut melibatkan sejumlah orang, masalah publik memiliki dampak pada masyarakat atau beberapa orang yang berkepentingan sebagai anggota masyarakat.

2.2 Sistem Informasi Manajemen Lingkungan

2.2.1 Pengertian Sistem

Sistem merupakan kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain dan saling keterkaitan tersusun secara sistematis. Sistem menurut Jogiyanto adalah “kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan”. (Jogiyanto, 1999:4). Berdasarkan pengertian di atas, sistem merupakan kumpulan dari bagian-bagian atau komponen-komponen subsistem atau bagian dari sistem

yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk membentuk satu kesatuan dalam menjalankan fungsi tertentu yang mempengaruhi proses dari setiap subsistem atau bagian sistem secara keseluruhan untuk mencapai satu tujuan tertentu.

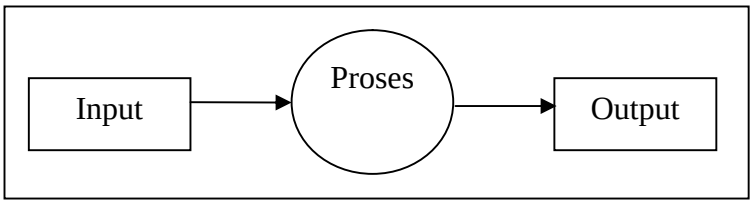
Menurut Edhy Sutanta dalam bukunya *Sistem Informasi Manajemen*, sistem dapat didefinisikan sebagai ”sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan.” (Sutanta, 2003: 4). Sistem merupakan satu kesatuan, dimana antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Keterkaitan akan lepas apabila salah satu komponen ada yang tidak mendukung. Implementasi sistem diperlukan adanya kebersamaan dan kerjasama sehingga tujuan yang tercapai sesuai dengan yang diharapkan bersama.

Azhar Susanto dalam bukunya *Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya*, mendefinisikan sistem adalah “kumpulan atau group dari subsistem atau bagian atau komponen apapun baik phisik ataupun non phisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu”. (Susanto, 2000: 3). Berdasarkan pengertian di atas, sistem akan bekerja apabila adanya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Hubungan di sini berawal dari adanya komunikasi yang baik antar satu kesatuan untuk mencapai satu tujuan tertentu.

2.2.1.1 Bentuk Umum Sistem

Bentuk umum dari suatu sistem terdiri atas masukan (*input*), proses dan keluaran (*output*), dalam bentuk umum sistem ini bisa melakukan satu atau lebih masukan yang akan diproses dan menghasilkan keluaran sesuai dengan rencana yang telah direncanakan sebelumnya. Bentuk umum sistem yang telah dibahas dapat dilihat secara singkat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.1
Bentuk Umum Sistem



Sumber: Jogiyanto, 1999: 4

Berdasarkan gambar bentuk umum sistem di atas, sistem merupakan komponen yang saling berkaitan. Sistem yang saling bekerja sama akan saling berinteraksi untuk membentuk satu kesatuan. Komponen yang masuk ke dalam sistem akan di proses sehingga menghasilkan data. Data tersebut apabila sudah terpenuhi akan menghasilkan informasi. Informasi yang dihasilkan akan mempengaruhi proses dari setiap subsistem atau bagian sistem untuk mencapai satu tujuan tertentu. Gambaran bentuk umum sistem akan diperjelas melalui karakteristik sistem itu sendiri. Karakteristik perlu dijelaskan, karena di dalam suatu sistem ada komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan. Komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain, sehingga dalam prosesnya akan menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan.

2.2.1.2 Karakteristik Sistem

Jogiyanto mengemukakan, bahwa karakteristik sistem sebagai berikut:

1. komponen-komponen (*component*)
   komponen-komponen atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem.
2. batas sistem (*boundary*)
   batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya.
3. lingkungan luar (*environment*)
   lingkungan luar dari suatu sistem atau apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem.
4. penghubung sistem (*system interface*)
   penghubung sistem mempunyai media penghubung antara suatu subsistem dengan subsistem yang lainnya.
5. masukan sistem (*system input*)
   masukan (*input*) istem adalah energi yang dimasukan kedalam sistem.
6. keluaran sistem (*system output*)
   keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna.
7. pengolahan sistem(*system processing*)
   suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan mengubah masukan menjadi keluaran.
8. sasaran sistem
   suatu sistem mempunyai tujuan (*goal*) atau sasaran (*objektive*) lingkungan luar.

(Jogiyanto, 1999:13).

Berdasarkan pendapat di atas, karakteristik sistem merupakan kegiatan yang mempengaruhi untuk mendapatkan informasi. Karakteristik sistem merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah komponen sistem, yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena bersifat saling keterkaitan satu sama lain, serta saling berhubungan.

2.2.2 Pengertian Informasi

Informasi merupakan salah satu sumber daya penting dalam manajemen modern. Keputusan strategis banyak yang bergantung kepada informasi. Informasi

tidak hanya dipakai oleh pihak internal dalam organisasi, tetapi juga dipakai oleh pihak eksternal (di luar organisasi). Setiap individu memerlukan informasi yang berbeda menurut kepentingan-kepentingannya.

Menurut Indrajit, informasi adalah "hasil dari pengolahan data yang secara prinsip memiliki nilai atau *value* yang lebih dibandingkan dengan data mentah". (Indrajit, 2006: 2). Informasi dapat meningkatkan pengetahuan seseorang. Adanya informasi, membuat tingkat kepastian menjadi meningkat. Menurut Susanto definisi informasi adalah "hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat" (Susanto, 2000: 37). Informasi merupakan hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya, dan suatu informasi mengambarkan kejadian-kejadian nyata yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan.

Menurut Sutabri dalam bukunya *Sistem Informasi Manajemen,* informasi dapat "menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian pemakai informasi yang disampaikan kepada pemakai mungkin merupakan hasil data yang dimasukan kedalam dan pengolahan suatu model keputusan". (Sutabri, 2005: 24-25). Pengambilan keputusan informasi hanya dapat menambahkan kemungkinan kepastian atau bisa mengurangi keputusan tersebut, dalam bermacam-macam pilihan. Informasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Benar atau salah, dalam hal ini, informasi berhubungan dengan kebenaran terhadap kenyataan. Jika penerima informasi yang salah dipercaya, maka efeknya seperti kalau informasi itu benar.
2. Baru, informasi dapat diperbaharui atau memberikan perubahan terhadap informasi yang telah ada.
3. Tambahan, informasi dapat memperbaharui atau memberikan perubahan terhadap informasi yang telah ada.

4. Korektif, informasi dapat digunakan untuk melakukan koreksi terhadap informasi sebelumnya yang salah atau kurang benar.
5. Penegas, informasi dapat mempertegas informasi yang telah ada sehingga keyakinan terhadap informasi semakin meningkat.

(dalam Kadir, 2003: 36).

Berdasarkan ciri-ciri di atas, informasi yang akan disampaikan kepada orang lain, harus jelas. Ketidakjelasan informasi yang disampaikan akan membuat kesalahpahaman antar pemakai informasi. Kesalahpahaman tersebut dapat di cegah apabila kualitas informasi baik, dan sesuai dengan data yang ada.

2.2.3 Kualitas Informasi

Kualitas Informasi (*Quality of Information*) terkadang juga dipakai untuk menyatakan informasi yang baik. Hal yang dapat dijadikan ukuran untuk menjadikan informasi tersebut berkualitas adalah:

1. Relevansi
2. Ketepatan waktu
3. Keakurasian.

(dalam Kadir, 2003: 38-46).

Kualitas informasi memang merupakan hal yang bisa dijadikan sebuah ukuran. Hal tersebut sesuai dengan Jogiyanto bahwa kualitas terdiri dari:

1. **Akurat,** berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Akurat mencerminkan maksud dari informasi tersebut. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai kepenerima informasi kemungkina banyak terjadi gangguan (*noise*) yang dapat merubah atau merusak informasi tersebut.
2. **Tepat pada waktunya,** informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi karena informasi merupakan landasan dalam proses pengambilan keputusan. Bila pengambilan keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal untuk organisasi. Untuk itu kecepatan informasi saat ini sangat diperlukan. Dalam memberikan informasi dengan cepat maka diperlukan teknologi-teknologi mutakhir dalam mengolah ataupun proses pengiriman informasi.

3. **Relevan**, informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Karena relevansi informasi untuk setiap orang itu berbeda-beda.

(Jogiyanto, 2001:10).

2.2.4 Pengertian Manajemen

Pengertian manajemen menurut Hasibuan, Malayu S.P, dalam bukunya *Manajemen Sumber Daya Manusia* adalah ”ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu”. (Hasibuan, 2006:255). Manajemen terdiri dari adanya sumber daya yang merupakan keberhasilan proses dan merupakan hal yang mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan dalam hal ini mengenai kebijakan pembuatan SIM Lingkungan.

Azhar Susanto dalam dalam bukunya *Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya*, memandang manajemen sebagai “upaya atau proses pencapaian tujuan dengan menggunakan keahlian orang lain”. (Susanto, 2000:72). Berdasarkan pemaparan di atas manajemen merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen merupakan kegiatan untuk mengatur anggotanya supaya mau melakukan kegiatan yang dibebankan kepadanya.

2.2.5 Lingkungan

Lingkungan hidup adalah “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”. (Wardhana, 2004: 286). Menurut Soemarwoto dalam

bukunya *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan* dikatakan bahwa lingkungan hidup diartikan sebagai “segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.” (Soemarwoto, 2001: 19). Aspek yang ada dalam lingkungan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di dalamnya untuk mempertahankan atau merusak lingkungan itu sendiri.

Lingkungan hidup yang ada memiliki cakupan yang luas dan tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administratif. Lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batasan wilayah wewenang dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.6 Sistem Informasi Manajemen Lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan kasubbid penerapan manajemen lingkungan, SIM Lingkungan adalah suatu sistem yang diterapkan oleh BPLH untuk mengelola lingkungan. Pengelolaan lingkungan tersebut baik dari segi geografis maupun demografis yang berkaitan dengan kondisi lingkungan Kabupaten Bandung. SIM Lingkungan diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih efisien terhadap masyarakat. Masyarakat setidaknya tidak mengalami kesulitan dalam mencari dan mengetahui perkembangan kondisi yang terjadi di Kabupaten Bandung.

2.3 Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.3.1 Pengertian Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan harus mengalami pengelolaan yang cukup baik untuk mempertahankan kelestariannya. Pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Wardhana, 2004: 287). Pengelolaan lingkungan hidup sangat erat kaitannya dengan keadaan yang dikarenakan oleh faktor manusia, sehingga banyak aturan-aturan yang ditetapkan hanya untuk mengelola lingkungan hidup yang ada.

Konsep pengelolaan lingkungan hidup yang ada kelestarian merupakan faktor utama yang harus dilaksanakan, dengan kelestarian yang terjaga akan dapat memenuhi keseimbangan dalam lingkungan itu sendiri. Soemarwoto mengungkapkan bahwa pengelolaan lingkungan adalah “upaya sadar untuk memelihara atau dengan memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya”. (Soemarwoto, 2001:79). Menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada, maka sangat diharapkan peranan dari manusia itu sendiri dalam memperbaiki mutu lingkungan yang ada, sehingga dapat bermanfaat bagi generasi sekarang dan akan datang.

2.3.2 Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Lingkungan Hidup

Program pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (aparatur pemerintah dan masyarakat) dalam mengelola lingkungan hidup, sehingga dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

1. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan.
2. Terkendalinya pemanfaatan secara bijaksana dan lestari sumber daya.
3. Terwujudnya manusia sebagai pembina lingkungan hidup.

Adapun sasaran yang dikehendaki dari pengelolaan lingkungan hidup adalah:

1. Terciptanya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidup.
2. Terwujudnya manusia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi dan membina lingkungan hidup.
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

(Sumber: Status Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, 2009).